



# LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMONGAN



2024



JL. Lamongrejo 92 Lamongan  
(0322) 321706, 317611  
Email : bakesbang@lamongankab.go.od  
Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Resiko selalu timbul dari segala aspek kehidupan dan bersinggungan langsung dengan sosial masyarakat. Informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat menjangkau dan berinteraksi secara bebas, tentunya dapat memunculkan delik negatif yang menggerus nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disadari dan dipatuhi oleh masyarakat. Keberlanjutan nilai sosial, budaya, dan politik perlu dipertahankan dengan asas gotong royong dan kebersamaan, baik antar masyarakat sendiri maupun antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi sinergi positif yang dapat meminimalisir ataupun menghilangkan resiko.

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan menjadi sarana untuk mendapatkan informasi, pelayanan, dan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Program yang direncanakan dan diimplementasikan selalu berkaitan erat dengan kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini merupakan bentuk

komitmen dan konsistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang reaktif dan visioner dalam rangka manajemen resiko.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan penyusunan laporan penilaian risiko tahun 2024 bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang dibutuhkan Solusi/rekomendasi kepada unit kepatuhan sebagai sarana pemilik risiko dalam mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

## **D. RUANG LINGKUP**

Kegiatan penilaian Resiko tahun 2024 di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengetahui skala dampak dan intensitas terjadinya resiko yang sudah disusun terhadap pencapaian tugas dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

## **BAB II**

### **PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

#### **A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAATINI**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku pelaksana urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten Lamongan telah Menyusun register Resiko OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik di Kabupaten Lamongan, Adapun resiko yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu resiko strategis dan operasional. kondisi lingkungan pengendalian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern dapat dikategorikan memiliki nilai “memadai” sebagaimana tabel di bawah ini :

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN**  
**CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**  
**Pemerintah Kabupaten Lamongan**  
**2024**

Pemda : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEEN (R)																	SIMPULAN KUISIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	Modus		
<b>A</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>																			Memadai	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	4	3	4	4	3	3	3	2	4	3	4	3	2	3	3	3	3	Memadai	
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	4	3	3	4	3	4	3	2	3	4	4	3	2	3	4	4	3	Memadai	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	4	3	Memadai	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	Memadai	
<b>B</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>																			Memadai	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	Memadai	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	4	2	3	4	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	4	3	3	Memadai	
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	1	4	4	3	3	3	2	3	2	1	2	4	3	4	3	3	Memadai	
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>																			Memadai	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	Memadai	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali laporan risiko/masalah	3	4	3	4	4	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	3	4	3	3	4	3	2	4	3	3	3	3	4	4	3	3	Memadai	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai	
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (cascading)	3	4	4	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai	
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	4	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
<b>D</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>																			Memadai	
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	4	3	4	3	3	2	4	3	3	2	3	4	4	3	3	Memadai	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	2	3	4	3	Memadai	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	3	4	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
<b>E</b>	<b>PENDELEGAISAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>																			Memadai	
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	Memadai	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai	
3	Kewenangan direview secara periodik	3	4	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	Memadai	

F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA															Memadai							
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	Memadai			
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	4	3	4	4	3	3	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3	Memadai			
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	3	2	1	2	1	2	3	3	4	3	3	Memadai		
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	4	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	Memadai		
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	2	4	2	3	Memadai		
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	3	Memadai		
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	Memadai		
G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF															Memadai							
1	Inspektorat Daerah melakukan review atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	4	3	4	4	4	4	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai		
2	Inspektorat Daerah melakukan review atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	Memadai	
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPiP	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	4	3	3	4	4	4	4	3	2	3	4	3	3	3	3	4	3	3	Memadai	
H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT															Memadai							
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki ketertautan operasional telah terbangun	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	Memadai		
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	Memadai	

## **B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan mitigasi Resiko memiliki beberapa kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai sebagaimana berikut :

1. Adanya pegawai yang belum secara tepat mengisi posisi/jabatan. Masih adanya Nilai IP-ASN OPD yang masih rendah dan disebabkan dimensi kompetensi ASN yang rendah
2. Masih perlu dilakukan pembaruan susunan organisasi terhadap pejabat fungsional dan informasi terkait pedoman dalam penyususnannya.

Guna mengatasi lingkungan pengendalian yang kurang memadai di atas maka diperlukan beberapa startegi rencana tindak pengendalian perbaikan terhadap lingkungan pengendalian sebagaimana tabel sebagai berikut :

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	Kondisi di OPD cukup memadai	Kondisi di OPD cukup memadai melakukan pemantauan secara intensif terhadap pelaksanaan aturan perilaku yang dilakukan oleh seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan	Sekretaris	1 Tahun
2	Adanya pegawai yang belum secara tepat mengisi posisi/jabatan. Masih adanya Nilai IP-ASN OPD yang masih rendah dan disebabkan dimensi kompetensi ASN yang rendah	Melakukan Evaluasi Kinerja Secara Berkala dan Pemberian Reward dan Punishment dari hasil pengukuran kinerja	Kepala Badan	1 Tahun
3	Kondisi di OPD cukup memadai	Kondisi di OPD cukup memadai namun tetap memberikan arahan kepada seluruh pegawai dan seluruh organisasi dalam melakukan perubahan untuk mencapai kinerja yang lebih baik	Kepala Badan	Triwulan (Januari, April, Juli dan Oktober)
4	Sudah cukup memadai namun masih perlu dilakukan pembaruan susunan organisasi terhadap pejabat fungsional dan informasi terkait pedoman dalam penyusunannya	Kondisi di OPD cukup memadai namun tetap melaksanakan Sosialisasi terkait SOTK Pejabat Fungsional dikarenakan masih adanya Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM sewaktu-waktu	Bagian Organisasi	1 Tahun
5	Kondisi di OPD cukup memadai	Kondisi di OPD cukup memadai namun tetap melaksanakan koordinasi dan sosialisasi SOP pendelegasian wewenang terkait batasan kewenangan kepada seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan	Sekretaris	Setiap Bulan
6	Kondisi di OPD cukup memadai	Kondisi di OPD cukup memadai namun tetap melakukan sosialisasi dan penerapan secara bertahap kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM sesuai peraturan perundang-undangan terbaru (Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Januari-Februari
7	Kondisi di OPD cukup memadai	Kondisi di OPD cukup memadai namun tetap memantau wewenang diberikan kepada pegawai agar sesuai dengan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.	Kepala Badan	1 Tahun
8	Kondisi di OPD cukup memadai	Kondisi di OPD cukup memadai namun tetap melanjutkan hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Inspektorat	Sekretaris	1 Tahun

## **BAB III**

### **PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

#### **A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN**

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memperhatikan dan mengacu pada casecading Misi IV RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya Toleransi” dengan indikator Nilai Toleransi. Sehingga tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan adalah “Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik”.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya harmonisasi sosial dan Wawasan Kebangsaan
2. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat
3. Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah

#### **B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO**

Berdasarkan pada hasil analisis penyusunan register resiko, maka dapat dijabarkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten Lamongan memiliki resiko yang berhasil dianalisis yang terbagi kedalam resiko startegis dan resiko operasional sebagaimana matriks yang disajikan sebagai berikut :

**Tabel Matriks Resiko Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Kertas Kerja Strategis OPD**

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	<b>Pemerintah Kabupaten Lamongan</b>
Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Tahun Penilaian	<b>2024</b>
Periode yang Dinilai	<b>2024</b>
Tujuan Strategis	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik
Urusan Pemerintahan	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik</b>
OPD yang dinilai	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Tujuan Strategis Pemerintah	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik
Sasaran	1. Meningkatnya harmonisasi sosial dan wawasan kebangsaan 2. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat 3. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/ UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Persentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang ditangani	Majemuknya Potensi Konflik dapat terjadi sewaktu waktu	RSO.24.05.06.01	Kepala Badan	Adanya perbedaan antar individu dan kelompok	Eksternal	C	Majemuknya konflik dan berkelanjutan sehingga menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis	Masyarakat dan Pemerintah
2	Persentase peningkatan pendidikan politik	Tingginya angka golput masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu	RSO.24.05.06.02	Kepala Badan	Sasaran pendidikan politik belum dilakukan secara menyeluruh	Internal	C	Kesadaran politik masyarakat masih rendah	Masyarakat dan Pemerintah
3	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.24.05.06.03	Kepala Badan	Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	Internal	C	Kurang efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi	Bakesbangpol dan Pemerintah

## Tabel Matriks Resiko Oprasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Penda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Tahun Penilaian	2024
Periode yang Dinilai	2024
Tujuan Strategis	
Sasaran strategis OPD	
Urusan Pemerintahan	Ketertiban, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik
OPD yang Dinilai	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab	C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik			Uraian	Sumber
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan	Terlambatnya penanganan konflik	R00 24.38.5.01	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	RKOM belum terbentuk sampai ditugaskan Kecamatan dan Desa	Internal	C Kurang cepat dan akurasi upaya Deni & Ceni	Masyarakat
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan	Masih terlanjur faham-faham radikal dan intoleran	R00 24.38.5.02	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Belum menyeluruhnya sasaran sosialisasi wawasan kebangsaan	Internal	C Berkembangnya faham-faham radikalisme di masyarakat	Masyarakat dan Pemerintah
3	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan	Belum terinventarisasi secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayaan	R00 24.38.5.03	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Kurang optimalnya sosialisasi terhadap PB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Perindustrian dan Menteri Dalam Negeri	Internal	C Data Penghambat kepercayaan tidak terdeteksi sehingga timbulnya kegiatan penghambat kepercayaan yang merusakkan masyarakat karena tidak ada pengawasan	Masyarakat dan Pemerintah
4	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan	Belum terinventarisasi keberadaan ormas secara menyeluruh	R00 24.38.5.04	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Banyaknya Oknum/Ormas dan LSM yang belum melaporkan keberadaannya	Eksternal	C Timbulnya kegiatan Ormas, Orsem, dan LSM yang bertentangan dengan pascasila karena tidak ada pengawasan	Masyarakat dan Pemerintah
5	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol, Pemlu/Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol, Pemlu/Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan	Minimnya pemahaman tentang gender kaum perempuan	R00 24.38.5.05	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kurangnya kepedulian terhadap peningkatan kesadaran politik kaum perempuan	Eksternal	C Peran perempuan dalam partisipasi politik kurang	Masyarakat dan Pemerintah
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Dokumen Perencanaan Kinerja dan Evaluasi tepat waktu	Pelaksanaan	Belum optimálnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan	R00 24.38.5.06	Sekretaris	Kurangnya pemahaman dan koordinasi antar lintas bidang terhadap pelaporan serta monev pelaksanaan kinerja dan anggaran kegiatan	Internal	C Pencapaian pelaporan yang tidak tepat waktu	Perangkat Daerah
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Dokumen laporan keuangan yang tepat waktu	Pelaksanaan	Belum optimálnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	R00 24.38.5.07	Sekretaris	Kurangnya pemahaman ASN terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban	Internal	C Mempengaruhi kualitas Laporan Pertanggungjawaban yang kurang lengkap	Perangkat Daerah
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Aparatur yang disiplin	Pelaksanaan	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	R00 24.38.5.08	Sekretaris	Kurangnya kesadaran ASN terhadap Dokumen Kepegawaian	Internal	C Pencapaian hasil kurang maksimal	Perangkat Daerah dan masing-masing ASN
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	Pelaksanaan	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	R00 24.38.5.09	Sekretaris	Keterbatasan SDM	Internal	C Pencapaian hasil kurang maksimal	Perangkat Daerah dan masing-masing ASN
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pelaksanaan	Belum terpenuhi kebutuhan perlengahan dan perlengkapan kantor	R00 24.38.5.10	Sekretaris	Keterbatasan anggaran	Internal	C Pencapaian hasil kurang maksimal	Perangkat Daerah dan masing-masing ASN
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	Pelaksanaan	Belum optimálnya kinerja terkait tugas yang telah ditetapkan	R00 24.38.5.11	Sekretaris	Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran dalam melaksanakan tugas	Internal	C Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan masing-masing ASN
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pelaksanaan	Sarana dan prasarana kurang memadai	R00 24.38.5.12	Sekretaris	Kurangnya kesadaran ASN dalam memilih sarana dan prasarana kantor	Internal	C Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan masing-masing ASN

## C. HASIL ANALISIS RISIKO

Berdasarkan pada matriks resiko strategis dan operasional di atas maka dapat dilakukan analisis terkait skala resiko yang akan dihadapi dalam urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten Lamongan ke depan, adapun skala risiko serta penyebab dan dampak risiko dapat kami sajikan melalui tabel berikut :

Daftar Risiko Prioritas							
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2024						
No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
<b>Risiko Strategis OPD</b>							
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Majemuknya Potensi Konflik dapat terjadi sewaktu waktu	RSO.24.05.06.01	12	Kepala Badan	Adanya perbedaan antar individu dan kelompok	Majemuknya konflik dan berkelanjutan sehingga menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tingginya angka gotput masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu	RSO.24.05.06.02	9	Kepala Badan	Sasaran pendidikan politik belum dilakukan secara menyeluruh	Kesadaran politik masyarakat masih rendah
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.24.05.06.03	7	Kepala Badan	Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	Kurang efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi
<b>Risiko Operasional OPD</b>							
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Terlambatnya penanganan konflik	ROO 24.38.5.01	9	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	FKDM belum terbentuk sampai ditingkat Kecamatan dan Desa	Kurang cepat dan akuratnya upaya Deni & Ceni
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Masih tertanam faham-faham radikal dan intoleran	ROO 24.38.5.02	9	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Belum menyeluruhnya sasaran sosialisasi wawasan kebangsaan	Berkembangnya faham-faham radikalisme di masyarakat
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Belum terinventarisir secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayaan	ROO 24.38.5.03	7	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Kurang optimalnya sosialisasi terhadap PB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri	Data Penghayat kepercayaan tidak terdeteksi sehingga timbulnya kegiatan penghayat kepercayaan yang meresahkan masyarakat karena tidak ada pengawasan
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Belum terinventarisasi keberadaan ormas secara menyeluruh	ROO 24.38.5.04	11	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Banyaknya Orkesmas/Yayasan dan LSM yang belum melaporkan keberadaannya	Timbulnya kegiatan Ormas, Orpem, dan LSM yang bertentangan dengan pancasila karena tidak ada pengawasan
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Minimnya pemahaman tentang gender kaum perempuan	ROO 24.38.5.05	9	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kurangnya kepedulian terhadap peningkatan kesadaran politik kaum perempuan	Peran perempuan dalam partisipasi politik kurang
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan	ROO 24.38.5.06	8	Sekretaris	Kurangnya pemahaman dan koordinasi antar lintas bidang terhadap pelaporan serta monev pelaksanaan kinerja dan anggaran kegiatan	Pencapaian pelaporan yang tidak tepat waktu
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO 24.38.5.07	9	Sekretaris	Kurangnya Pemahaman ASN terkait dokumen laporan pertanggungjawaban	Mempengaruhi Kualitas Laporan Pertanggungjawaban yang kurang lengkap
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO 24.38.5.08	10	Sekretaris	Kurangnya kesadaran ASN terhadap Dokumen Kepegawaian	Pencapaian hasil kurang maksimal
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO 24.38.5.09	12	Sekretaris	Keterbatasan SDM	Pencapaian hasil kurang maksimal
10	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	ROO 24.38.5.10	15	Sekretaris	Keterbatasan anggaran	Pencapaian hasil kurang maksimal
11	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang telah ditetapkan	ROO 24.38.5.11	10	Sekretaris	Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran dalam melaksanakan tugas	Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sarana dan prasarana kurang memadai	ROO 24.38.5.12	13	Sekretaris	Kurangnya kesadaran ASN dalam memilah sarana dan prasarana kantor	Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah

Adapun rencana tindak pengendalian ( RTP ) terhadap risiko di atas yang berisi jadwal, celah pengendalian, pemilik/penanggung jawab, serta jadwal rencana target waktu penyelesaian risiko yang dihadapi dapat dijelaskan melalui matriks formulir kertas kerja sebagai berikut :

**Formulir Kertas Kerja**  
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2024						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Ketetraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik						
Dinas Terkait	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:</b>							
1	Majemuknya Potensi Konflik dapat terjadi sewaktu waktu	RSO.24.05.06.01	Melaksanakan Deteksi Dini dan Cegah Dini	Belum Maksimal	Peningkatan sistem pengamanan diwilayah dengan Mengedepankan unsur 3 pilar: 1. Tertib administrasi kependudukan 2. Tamu wajib lapor 1 x 24 jam 3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang yang tidak dikenal	Kepala Badan	12 Bulan
2	Tingginya angka golput masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu	RSO.24.05.06.02	Sosialisasi Pendidikan Politik	Sasaran Pendidikan Politik	Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Parpol, Ormas, Mahasiswa untuk memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat serta memasang iklan pemilu menjelang pesta demokrasi	Kepala Badan	5 Tahun
3	Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.24.05.06.03	Monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan setiap tribulanan dalam bentuk rapat dan laporan tribulan.	Pelaksanaan rapat tribulan belum terlaksana secara konsisten dan belum melibatkan seluruh pegawai.	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Kepala Badan	12 Bulan
<b>Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:</b>							
1	Terlambatnya penanganan konflik	ROO 24.38.5.01	FKDM Kabupaten	Belum Maksimal	Membentuk FKDM sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan
2	Masih tertanam faham-faham radikal dan intoleran	ROO 24.38.5.02	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Belum Maksimal	Pemerataan Sasaran Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	12 Bulan
3	Belum terinventarisir secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayaan	ROO 24.38.5.03	Monitoring Aliran Kepercayaan	Belum Menyeluruh	Mengintensifkan pembinaan kepada penghayat kepercayaan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	12 Bulan
4	Belum terinventarisasi keberadaan ormas secara menyeluruh	ROO 24.38.5.04	Monitoring Organisasi Kemasyarakatan	Belum Menyeluruh	Menghimbau kepada Ormas agar melaporkan keberadaannya melalui Camat	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	12 Bulan
5	Minimnya pemahaman tentang gender kaum perempuan	ROO 24.38.5.05	Sosialisasi Politik Perempuan	Belum Maksimal	Pemerataan Sasaran Sosialisasi Politik Kaum perempuan di seluruh Kecamatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	12 Bulan
6	Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan	ROO 24.38.5.06	Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Tepat Waktu	Terlambatnya penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Melakukan Monev Triwulan	Sekretaris	12 Bulan
7	Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO 24.38.5.07	Ketepatan Laporan Pertanggungjawaban	Adanya temuan terkait SPJ	Koordinasi dengan inspektorat terkait Laporan Pertanggungjawaban yang kurang tepat	Sekretaris	12 Bulan
8	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO 24.38.5.08	Dokumen Administrasi Kepegawaian	Adanya Dokumen administrasi kepegawaian yang tidak lengkap	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Sekretaris	12 Bulan
9	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO 24.38.5.09	Tersedianya Kualitas Layanan Administrasi Umum	Keterbatasan SDM	Sosialisasi kepada ASN	Sekretaris	12 Bulan
10	Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	ROO 24.38.5.10	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Koordinasi dengan BPKD terkait penganggaran	Sekretaris	12 Bulan
11	Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang telah ditetapkan	ROO 24.38.5.11	Penunjang Kinerja Pegawai	Keterbatasan SDM	Rekrutmen SDM yang memadai	Sekretaris	12 Bulan
12	Sarana dan prasarana kurang memadai	ROO 24.38.5.12	Tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai	Kurangnya sarana dan Prasarana yang memadai	Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Sekretaris	12 Bulan

## D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut akan dijabarkan mengenai pengendalian yang sudah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan terhadap penanggulangan risiko startegis dan operasional yang telah diidentifikasi dan telah dilaksanakan yang dapat kami jabarkan ke dalam matriks tabel sebagai berikut :

**Formulir Kertas Kerja**  
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian	2024				
Tujuan Strategis Pemda					
Urusan Pemerintahan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik				
Dinas Terkait	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
<b>Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:</b>					
1	Peningkatan sistem pengamanan diwilayah dengan Mengedepankan unsur 3 pilar: 1. Tertib administrasi kependudukan 2. Tamu wajib lapor 1 x 24 jam 3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang yang tidak dikenal	Monitoring Renaksi	Kepala Badan	Tahun 2024	Januari-Desember
2	Kolaborasi dengan pihak ekternal seperti Parpol, Ormas, Mahasiswa untuk memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat serta memasang iklan pemilu menjelang pesta demokrasi	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Badan	Tahun 2024	Triwulan III
3	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Reviu hasil monev kinerja internal	Kepala Badan	Tahun 2024	Triwulan I s/d IV Tahun 2024
					Triwulan I Sudah Terlaksana
<b>Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:</b>					
1	Membentuk FKDM sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Kewaspadaan nasional dan Penanganan	Tahun 2024	Triwulan IV
2	Pemerataan Sasaran Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Tahun 2024	Triwulan IV
3	Mengintensifkan pembinaan kepada penghayat kepercayaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Tahun 2024	Triwulan IV
					Belum Terlaksana

4 Menghimbau kepada Ormas agar melaporkan keberadaannya melalui Camat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Tahun 2024	Triwulan IV	Belum Terlaksana
5 Pemerataan Sasaran Sosialisasi Politik Kaum prempuan di seluruh Kecamatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Tahun 2024	Triwulan III	Belum Terlaksana
6 Melakukan Monev Triwulan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024	Triwulan I Sudah Terlaksana
7 Koordinasi dengan inspektorat terkait Laporan Pertanggungjawaban yang kurang tepat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
8 Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
9 Sosialisasi kepada ASN	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
10 Koordinasi dengan BPKD terkait penganggaran	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
11 Rekrutmen SDM yang memadai	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
12 Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana

## E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pengendalian yang masih dibutuhkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dapat dilihat sebagai berikut:

## Tabel Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

### Formulir Kertas Kerja

Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2024						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik						
Dinas Terkait	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:</b>							
1	Majemuknya Potensi Konflik dapat terjadi sewaktu waktu	RSO.24.05.06.01	Melaksanakan Deteksi Dini dan Cegah Dini	Belum Maksimal	Peningkatan sistem pengamanan diwilayah dengan Mengedepankan unsur 3 pilar: 1. Tertib administrasi kependudukan 2, Tamu wajib lapor 1 x 24 jam 3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang yang tidak dikenal	Kepala Badan	12 Bulan
2	Tingginya angka golput masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu	RSO.24.05.06.02	Sosialisasi Pendidikan Politik	Sasaran Pendidikan Politik	Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Partai, Ormas, Mahasiswa untuk memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat serta memasang iklan pemilu menjelang pesta demokrasi	Kepala Badan	5 Tahun
3	Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.24.05.06.03	Monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan setiap tribulanan dalam bentuk rapat dan laporan tribulan.	Pelaksanaan rapat tribulan belum terlaksana secara konsisten dan belum melibatkan seluruh pegawai.	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Kepala Badan	12 Bulan
<b>Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:</b>							
1	Terlambatnya penanganan konflik	ROO 24.38.5.01	FKDM Kabupaten	Belum Maksimal	Membentuk FKDM sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan
2	Masih tertanam faham-faham radikal dan intoleran	ROO 24.38.5.02	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Belum Maksimal	Pemerataan Sasaran Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	12 Bulan
3	Belum terinventarisasi secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayaan	ROO 24.38.5.03	Monitoring Aliran Kepercayaan	Belum Menyeluruh	Mengintensifkan pembinaan kepada penghayat kepercayaan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	12 Bulan
4	Belum terinventarisasi keberadaan ormas secara menyeluruh	ROO 24.38.5.04	Monitoring Organisasi Kemasyarakatan	Belum Menyeluruh	Mengimbau kepada Ormas agar melaporkan keberadaannya melalui Camat	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	12 Bulan
5	Minimnya pemahaman tentang gender kaum perempuan	ROO 24.38.5.05	Sosialisasi Politik Perempuan	Belum Maksimal	Pemerataan Sasaran Sosialisasi Politik Kaum perempuan di seluruh Kecamatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	12 Bulan
6	Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan	ROO 24.38.5.06	Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Tepat Waktu	Terlambatnya penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Melakukan Monev Triwulan	Sekretaris	12 Bulan
7	Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO 24.38.5.07	Ketepatan Laporan Pertanggungjawaban	Adanya temuan terkait SPJ	Koordinasi dengan inspektorat terkait Laporan Pertanggungjawaban yang kurang tepat	Sekretaris	12 Bulan
8	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO 24.38.5.08	Dokumen Administrasi Kepegawaian	Adanya Dokumen administrasi kepegawaian yang tidak lengkap	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Sekretaris	12 Bulan
9	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO 24.38.5.09	Tersedianya Kualitas Layanan Administrasi Umum	Keterbatasan SDM	Sosialisasi kepada ASN	Sekretaris	12 Bulan
10	Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	ROO 24.38.5.10	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Koordinasi dengan BPKD terkait penganggaran	Sekretaris	12 Bulan
11	Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang telah ditetapkan	ROO 24.38.5.11	Penunjang Kinerja Pegawai	Keterbatasan SDM	Rekrutmen SDM yang memadai	Sekretaris	12 Bulan
12	Sarana dan prasarana kurang memadai	ROO 24.38.5.12	Tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai	Kurangnya sarana dan Prasarana yang memadai	Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Sekretaris	12 Bulan

## **BAB IV**

### **RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Kesuksesan Pengendalian risiko startegis dan operasional OPD salat satunya dipengaruhi oleh factor informasi dan komunikasi. Faktor informasi dan komunikasi diperlukan dalam penyampaian risiko strategis dan operasional serta rencana tindak pengendalian dalam menangani terjadinya risiko dalam urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten Lamongan. Berikut akan dijabarkan mengenai rancangan informasi dan komunikasi yang telah disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam matriks sebagai berikut:

## Tabel Rancangan Infokom

### Formulir Kertas Kerja Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2024						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik						
Dinas Terkait	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:</b>							
1	Peningkatan sistem pengamanan diwilayah dengan Mengedepankan unsur 3 pilar: 1. Tertib administrasi kependudukan 2, Tamu wajib lapor 1 x 24 jam 3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang yang tidak dikenal.	Sosialisasi	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Desa	Tahun 2024	Setiap Bulan	Sudah Terlaksana
2	Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Parpol, Ormas, Mahasiswa untuk memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat serta memasang iklan pemilu menjelang pesta demokrasi	Sosialisasi	Narasumber Eksternal di Bidangnya	Masyarakat Pemilih Pemula	Tahun 2024	Triwulan IV	Belum Terlaksana
3	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Rapat Koordinasi	Sekretariat Bakesbangpol	Seluruh Bidang Bakesbangpol	Tahun 2024	Triwulan I sd IV 2024	Triwulan I Sudah Terlaksana
<b>Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:</b>							
1	Membentuk FKDM sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa	Koordinasi	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Pegawai Kecamatan dan Perangkat Desa	Tahun 2024	Triwulan IV	Belum Terlaksana
2	Pemerataan Sasaran Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Sosialisasi	Narasumber Eksternal di Bidangnya	Masyarakat Kabupaten Lamongan	Tahun 2024	Triwulan IV	Belum Terlaksana
3	Mengintensifkan pembinaan kepada penghayat kepercayaan	Pembinaan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Penghayat Kepercayaan	Tahun 2024	Triwulan IV	Belum Terlaksana
4	Menghimbau kepada Ormas agar melaporkan keberadaannya melalui Camat	Koordinasi	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakatan	Tahun 2024	Triwulan IV	Belum Terlaksana
5	Pemerataan Sasaran Sosialisasi Politik Kaum perempuan di seluruh Kecamatan	Sosialisasi	Narasumber Eksternal di Bidangnya	Masyarakat Perempuan	Tahun 2024	Triwulan III	Belum Terlaksana
6	Melakukan Monev Triwulan	Rapat Koordinasi	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Seluruh Pegawai Bakesbangpol	Tahun 2024	Tahun 2024	Triwulan I Sudah Terlaksana
7	Koordinasi dengan inspektorat terkait Laporan Pertanggungjawaban yang kurang tepat	Koordinasi	Inspektorat	Perangkat Daerah dan seluruh ASN	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
8	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Sosialisasi/Bimtek	Kasubag Umum dan Kepegawaian, BKPSDM	Perangkat Daerah dan seluruh ASN	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
9	Sosialisasi kepada ASN	Koordinasi	BKPSDM	Perangkat Daerah dan seluruh ASN	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
10	Koordinasi dengan BPKD terkait penganggaran	Koordinasi	BPKAD	Perangkat Daerah dan PPTK	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
11	Rekrutmen SDM yang memadai	Koordinasi	BKPSDM & BPKAD	Perangkat Daerah	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
12	Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Koordinasi	Bidang Aset BPKAD	Perangkat Daerah	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana

## **BAB V**

### **RANCANGAN PEMANTAUAN**

Pengendalian dan pemantauan risiko merupakan salah satu faktor dalam penentuan keberhasilan sebuah organisasi dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian target dan kinerja organisasi perangkat daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik guna menghadapi risiko-risiko yang diidentifikasi dalam pencapaian tujuan organisasi maka disusun sebuah rancangan pemantauan yang dapat kami kabarkan melalui matriks tabel sebagaimana berikut :

## Tabel Rancangan Pemantauan

**Formulir Kertas Kerja**  
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian	2024				
Tujuan Strategis Pemda	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik				
Urusan Pemerintahan					
Dinas Terkait	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
<b>Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:</b>					
1	Peningkatan sistem pengamanan diwilayah dengan Mengedepankan unsur 3 pilar: 1. Tertib administrasi kepadudukan 2, Tamu wajib lapor 1 x 24 jam 3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang yang tidak dikenal	Monitoring Renaksi	Kepala Badan	Tahun 2024	Januari-Desember
2	Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Parpol, Ormas, Mahasiswa untuk memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat serta memasang iklan pemilu menjelang pesta demokrasi	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Badan	Tahun 2024	Triwulan III
3	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Reviu hasil monev kinerja internal	Kepala Badan	Tahun 2024	Triwulan I s/d IV Tahun 2024
<b>Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:</b>					
1	Membentuk FKDM sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tahun 2024	Triwulan IV
2	Pemerataan Sasaran Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Tahun 2024	Triwulan IV
3	Mengintensifkan pembinaan kepada penghayat kepercayaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Tahun 2024	Triwulan IV
4	Mengimbau kepada Ormas agar melaporkan keberadaannya melalui Camat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Tahun 2024	Triwulan IV
5	Pemerataan Sasaran Sosialisasi Politik Kaum prempuan di seluruh Kecamatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Tahun 2024	Triwulan III
6	Melakukan Monev Triwulan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024
7	Koordinasi dengan inspektorat terkait Laporan Pertanggungjawaban yang kurang tepat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024
8	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024
9	Sosialisasi kepada ASN	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024
10	Koordinasi dengan BPKD terkait penganggaran	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024
11	Rekrutmen SDM yang memadai	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024
12	Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dari hasil yang telah dijabarkan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah menyusun dokumen dalam pengelolaan risiko sesuai dengan kaidah dan semoga dokumen penilaian risiko tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai panduan dalam penanganan dan identifikasi risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD dalam tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten Lamongan.

